

**PERBANDINGAN
LATAR BELAKANG FILOSOFIS
KONSEP KEKELUARGAAN
DALAM SISTEM SOSIAL JAWA
DAN SISTEM KENEGARAAN INDONESIA**

Oleh : Sudaryanto¹

Abstract

Javanese take care of harmony and honour of their homeland as important as they take care of their family. Familiarity does not only occur in their family, but also in the wide society. Their society is considered as a big family and viewed as a harmony which requires to be taken care of. The harmonious life does not merely take care of an orderly social relationship, but it also respects and relates to supernatural realm. According to Javanese, the human life on the earth is directly interconnected with the supernatural realm.

The modern state of Indonesia applies a social system of familiarity which is based on harmonious values and mutual assistance (mutuality) and reciprocity. The values exist on the social system of Java. However, there is an elementary philosophical difference. The philosophy of modern Indonesia state views that the familiarity, which includes harmonious values, mutual assistance and reciprocity, only occurs between state and citizen, not the supernatural realm.

Keyword: familiarity, respect, harmony, mutuality, reciprocity.

A. Pendahuluan

Hidup bersama dalam suatu masyarakat bukan sebagai kepastian yang sekedar berdasar pada naluri seperti terdapat dalam gerombolan binatang seperti semut-semut atau serigala. Hidup bermasyarakat merupakan ciri bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Kehidupan sosial, bermasyarakat pada manusia adalah hasil kemampuan rohani.

Masyarakat manusia tidak berkembang atas dorongan naluri semata-mata sehingga berlangsung menurut pola-pola yang sudah ditentukan secara naluriah. Terbentuknya masyarakat adalah hasil

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat UGM.

perjuangan. Hanya manusia sajalah yang memiliki kesadaran hidup dengan sesamanya. Bagi hewan tidak terdapat pengertian atau tidak ada istilah “sesama” (Peursen, 1978: 214). Manusia memahami orang lain sebagai “sesama” berkat kesadaran yang dimilikinya.

Di dalam lingkungan keluarga manusia pertama kali belajar bersosialisasi dengan orang disekitarnya. Apa yang dipelajari seseorang dalam keluarga, bagi keluarga Jawa berbeda dengan asumsi masyarakat intelektual saat ini yang lebih mengutamakan pendidikan kognitif. Bagi masyarakat Jawa di dalam keluarga seseorang diajarkan kemampuan yang memadai untuk “menjadi orang Jawa”. Hildred Geertz (1982 : 111,115) menyatakan, bahwa sebelum usia lima atau enam tahun seorang anak belum dapat diharapkan menjadi seorang penurut, pandai mengendalikan diri dan mengerti kesopanan. Oleh karena itu anak seusia itu disebut “*durung jawa*” yang artinya “belum bersifat Jawa”. Sebutan itu berlaku juga pada orang dewasa yang tidak atau belum mampu mengendalikan diri dan bersikap tidak sopan.

Pendidikan di dalam keluarga Jawa menekankan pembelajaran menjadi orang yang mampu bersosialisasi yang oleh Niels Mulder (1973: 48-49) disebut tidak menghasilkan orang yang mandiri melainkan menekankan menjadi orang sosial. Ia juga mengungkapkan bahwa cara berfikir yang sangat konkret dan didasari hubungan sosial yang dekat dan akrab, serta hormat yang ditujukan kepada ayah dan para pemimpin menjadi eksponen tata tertib. Orang Jawa ingin mendapatkan perlindungan darinya.

Menjaga harmoni dan kehormatan kampung halaman sama pentingnya dengan menjaga kerukunan rumah-tangga dan kehormatan keluarga. Walaupun tidak berkaitan dengan urusan pribadi orang Jawa melakukan kontrol terhadap perilaku anak-anak kecil, remaja bahkan orang dewasa yang tinggal satu kampung. Hal ini bukan sebagai manifestasi dari sikap campur tangan terhadap rumah tangga dan urusan pribadi orang lain, melainkan bentuk kepedulian sosial dan kekeluargaan.

Pada masa persidangan BPUPKI negara kekeluargaan oleh para pendiri negara disepakati sebagai dasar Indonesia merdeka, bahkan sebelum dasar negara Pancasila disepakati. Ketika terdapat usulan untuk memasukkan pasal tentang hak asasi manusia dan hak warga negara, mendapat penolakan yang keras. Penolakan itu atas dasar argumen bahwa hak asasi manusia dan hak warga negara itu berdasar pada faham individualistik yang tidak sesuai dengan dasar

kekeluargaan yang sudah disepakati bersama (Bahar, dkk, ed., 1995 : 251, 252).

B. Orang Jawa dan Kebudayaan Jawa

Pulau Jawa didiami oleh tiga kelompok etnis besar yaitu Jawa, daerah tempat tinggal mereka disebut Tanah Jawa; etnis Sunda tinggal di Tanah Pasundan dan etnis Betawi tinggal di Tanah-Betawi. Orientasi kehidupan masyarakat Jawa dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, masyarakat yang berorientasi hidup menurut ajaran Islam, disebut sebagai santri atau budaya pesisir. Kedua, yang berorientasi hidup menurut tradisi Hindu-Jawa, yang dianut lingkungan kraton sebagai budaya priyayi yang merupakan percampuran antara Islam (mistik Islam) dengan mistik Hindu-Jawa. Ketiga, mereka yang berorientasi hidup berdasar mistik Jawa disebut sebagai *abangan* atau penganut budaya *abangan*. Hubungan antara budaya kraton dan budaya *abangan* sangat erat dikarenakan sama-sama berorientasi pada mistik Hindu-Jawa. Baik *priyayi* maupun *abangan* sering dianggap berorientasi pada kebudayaan Jawa tradisional, oleh karenanya disebut sebagai pengikut ajaran *kejawen*. Secara geografis penganut *kejawen* itu berada di pedalaman dan di pantai Selatan Pulau Jawa maka daerah itu disebut rakyat daerah *Kejawen*.

Penelitian ini tidak mengenai seluruh masyarakat yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Tanah Jawa sendiri tidak identik dengan daerah di mana mereka memakai bahasa ibu bahasa Jawa. Hal ini disebabkan antara lain karena bahasa Jawa yang dipergunakan di dataran-dataran rendah pesisir utara Jawa Barat, dari Banten Barat sampai ke Cirebon, berbeda dengan bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya. Yang disebut orang Jawa adalah orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa yang sebenarnya itu (Suseno, 2003 : 11).

Pusat kebudayaan Jawa berada pada dua kerajaan yang berasal dari kerajaan Mataram yaitu kerajaan Yogyakarta dan kerajaan Surakarta. Yang dimaksud dengan bahasa Jawa yang sebenarnya adalah bahasa Jawa yang mengikuti sebagian besar kaidah bahasa dan kosakata yang merujuk kepada penggunaan bahasa dua kerajaan tersebut. Dengan perkataan lain, bahasa Jawa yang sebenarnya adalah bahasa yang lazim dipergunakan sama dengan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dalam lingkungan dua kerajaan itu. Dengan demikian, maka orang Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang

berbahasa Jawa, atau meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Sebutan orang Jawa” selain dikaitkan dengan penduduk asli yang berbahasa Jawa yang mengikuti bahasa yang berpusat di kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, adalah mereka yang memiliki cara hidup berdasar kebudayaan Jawa. Kehidupan para santri di Jawa dapat dibedakan antara santri yang berorientasi pada kehidupan Islami yaitu yang hendak secara konsekuen menerapkan syariat Islam. Nasikun (1989 : 60, 61) menyebut perbedaan antara para penganut Islam reformis dengan penganut Islam yang masih menerapkan cara hidup berdasar pengaruh kebudayaan Jawa yang melakukan reaksi terhadap reformasi keagamaan.

Cara hidup santri dibedakan dengan cara hidup *abangan*. Para santri oleh Nasikun disebut sebagai penganut universalisme “keselamatan” yang dibedakan dengan pragmatisme dan relativisme golongan *abangan*. Golongan *abangan* kebanyakan penganut Islam nominal. Santri reformis atau yang berusaha hidup dengan mengikuti ajaran Islam yang murni dapat dikatakan sebagai kelompok yang bereaksi terhadap faham campuran antara Islam dan *kejawen* yang dipandangnya dengan *tahyul-tahyul*.

C. Pandangan Hidup Orang Jawa

Kejawen oleh Niels Mulder (1973: 14) disebut sebagai Javanisme, sebagai agama beserta pandangan hidup orang Jawa, menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap *narimo* terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah semesta alam. Ia juga mengemukakan bahwa kebatinan seringkali dianggap sebagai saripati Javanisme. Gaya hidup orang Jawa ialah kebatinan yaitu gaya hidup memupuk “batinnya” melalui mistik.

Perilaku orang Jawa yang mengikuti ajaran *kejawen* selalu dihubungkan dengan ‘dunia atas, dunia yang tidak nampak’, dunia supranatural. Lingkungan hidupnya bukan sekedar lingkungan jasmaniah melainkan berkaitan dengan yang rohaniyah. Hidupnya diliputi oleh kekuatan gaib atau kehidupan roh yang ada dimanamana. Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud mengikuti ajaran *kejawen* tidak harus dihubungkan dengan suatu sekte aliran kebatinan tertentu. Orang Jawa *kejawen* adalah orang mempercayai hidup menurut ajaran sebagaimana dilakukan para mistikus *kejawen*

adalah hidup penuh keutamaan, karena hidup semacam itu memperhalus rasa memupuk kepekaan rasa.

Mitologi wayang mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya pandangan hidup orang Jawa. Mitologi wayang yang bersumber pada kisah Mahabarata dan Ramayana tidak sekedar dipandang sebagai cerita fiksi. Cerita itu banyak difahami sebagai kisah hidup nenek moyang, sebagai sumber nilai yang sarat dengan teladan dan ajaran tentang kehidupan. Terdapat anggapan bahwa raja-raja Jawa adalah merupakan keturunan dari tokoh pewayangan seperti raja Dandang Gendis misalnya adalah keturunan Parikesit sebagai raja besar Astina Pura setelah perang Barata Yuda.

Kehidupan yang selaras antara alam gaib dan alam terindera dicapai oleh para bangsawan dan para guru kebatinan yang suka menjalani *laku* prihatin, bertapa sehingga memiliki kekuatan-kekuatan batin (*kasekten*) untuk menstabilkan atau mengatasi pengaruh-pengaruh alam gaib yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial maupun individu. Hidup di sekitar kraton, bahkan berbagai benda kraton dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di luar kraton, maka dapat dipakai sebagai sarana "*ngalap berkah*" atau mendatangkan imbas keberuntungan. Para guru kebatinan juga sering di datangi orang-orang sekitarnya untuk meminta nasihat; meminta sarana untuk mendapat keselamatan ketika akan mendirikan rumah, punya hajad seperti hendak menikahkan anaknya, dan melakukan upacara yang lainnya; bahkan sering diminta untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu benarlah bahwa pandangan hidup orang Jawa sering dikaitkan dengan kebatinan atau bersumber kepada kebatinan Jawa. Hal itu terjadi karena para guru kebatinan dipandang sebagai "*wong pinter*" artinya orang yang memiliki kepandaian dan kesaktian.

D. Filsafat Jawa dan Filsafat Indonesia

1. Filsafat Jawa

a. Metafisika Jawa

Metafisika Jawa kebanyakan bersifat monistik. Para pemikir Jawa mengakui adanya dunia materi dan dunia spiritual namun akhirnya meyakini bahwa alam terindera merupakan pengungkapan dari alam gaib/spiritual (Suseno, 2003 : 86). Di dalam karya sastra Jawa Kuno Arjunawiwaha menurut Kuntara Wiryamartana (1993: 120, 121) mengungkapkan tataran-tataran realitas atau alam.

Tataran alam menurut pemikiran Jawa adalah : *alam niskala*, *alam sakala-niskala* dan *alam sakala*. *Alam niskala* adalah alam *tan wadag*, tidak kelihatan atau tidak terjangkau indera. *Alam sakala – niskala* adalah campuran antara alam *tan wadag* dengan *wadag* (atau campuran antara yang tidak bertubuh dan yang bertubuh). *Alam sakala* adalah alam yang dapat diindera (atau bertubuh). *Alam sakala* termasuk di dalamnya dunia yang terindera ini adalah realitas, namun bukan realitas sejati.

b. Kosmologi Jawa

Kosmologi Jawa menyangkut persoalan makro kosmologi. Jika kosmologi Barat hanya membicarakan dunia yang terindera, maka kosmologi Jawa menyangkut juga pembicaraan tentang alam gaib. Seperti telah disebutkan sebelumnya alam gaib itu dapat berupa alam *sakala-niskala* maupun alam *niskala*. Oleh karena itu kosmologi Jawa bukan kosmologi sempit, hanya berkaitan dengan kejadian dunia dan perkembangannya (Wiryamartana, 1993 : 118).

Franz Magnis Suseno (2003: 87-90) menyatakan bahwa masyarakat (atau gejala sosial), alam, dan alam adikodrati dirasakan sebagai kesatuan. Orang Jawa mempercayai bahwa semua peristiwa berkaitan dengan alam metaempiris. Alam gaib menyatakan diri melalui kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan dan dipersonifikasikan sebagai roh-roh. Semua kekuatan alam dapat dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan gaib dari roh-roh.

Roh-roh itu dipandang sebagai penyebab dari berbagai peristiwa empiris. Sakit, kecelakaan atau bencana, sukses dan kebahagiaan dianggap disebabkan karena makhluk halus atau roh-roh yang dapat memberi berkah atau merugikan. Makhluk halus dan roh-roh adalah sesuatu yang menakutkan. Agar makhluk halus dan roh-roh itu tidak marah atau bersikap bersahabat, maka dibuatlah *sesajen*. *Sesajen* adalah lambang penghormatan dan kepedulian manusia terhadap mereka. *Sesajen* sering diartikan sebagai pemberian makanan sebagai tanda peduli atau bakti manusia terhadap makhluk halus (gaib) dan roh-roh.

c. Epistemologi Jawa

Orang Jawa istilah *ngerti* bukanlah sekedar adanya pengetahuan di dalam akal. Pengertian sebagai hasil dari proses “*ngerti*” jauh lebih luas dari sekedar pengetahuan rasional. *Rasa* adalah termasuk dalam kategori pengertian. Pengertian sering difahami sebagai kontrol kognitif terhadap sejumlah unsur. Sehingga bertambahnya pengetahuan diartikan sebagai

bertambahnya unsur-unsur baru di dalam perbendaharaan unsur-unsur yang telah dikuasai secara kognitif. Namun bagi orang Jawa pengertian itu bukanlah luasnya perbendaharaan kognitif, atau banyaknya unsur-unsur yang dicerna, melainkan proses perkembangan pada subjek yang mengerti itu sendiri. Melalui “pengertian” subjek yang mengerti sendiri mengalami pertumbuhan, dan menjadi lebih sadar terhadap realitas yang benar. Proses ini pertama-tama mengandaikan bahwa manusia melepaskan diri dari belenggu anggapan-anggapan, pendapat-pendapat dan bayangan-bayangan yang kasar, dangkal, sementara, lahiriah belaka. Dengan demikian “pengertian” dapat difahami sebagai proses pembebasan dari keterikatan pada bayang-bayang sementara dan lahiriah. Pembebasan itu berkaitan dengan penghalusan persepsi batin. Pengertian semacam itu lebih merupakan *rasa* daripada *pikir*. Pengertian bagi orang Jawa dengan dengan “kekuatan batin” (Suseno, 2003 : 198 – 200).

2. Filsafat Indonesia Berdasar Asumsi Falsafah Pancasila

a. Asumsi Metafisik Pancasila

Masyarakat Indonesia dengan Pancasilanya mengakui adanya kekuatan yang adi duniawi, namun juga mengakui otonomi manusia. Gejala sosial politik bukan lagi berasal dari kekuasaan adiduniawi melainkan gejala manusiawi yang berasal dari aktivitas kreatif manusia. Manusia dapat melakukan rekayasa sosial-politik, dan hidup manusia tidak lagi semata-mata dideterminir oleh kekuatan adiduniawi. Pandangan ini menolak pandangan kausa tunggal yang berasal dari kekuatan adi dunia. Dunia materi tidak lagi dihayati sebagai manifestasi dari yang spiritual, namun memiliki esensi tersendiri. Dengan demikian Pancasila berfaham dualistik.

b. Asumsi Kosmologis

Jika kosmologi Jawa bersifat makro kosmologi, memasukkan alam gaib yang adi duniawi sebagai bagian dari lingkungan kosmos di mana manusia tinggal, maka Pancasila tidak berasumsi demikian. Sebagaimana halnya kosmologi modern Pancasila memandang kehidupan gaib dan kehidupan dunia ini terpisah. Sebagaimana ajaran Islam mengakui adanya dunia gaib tetapi juga mengakui adanya dunia material, Pancasila memiliki asumsi yang sama. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pengakuan adanya keberadaan gaib dan alam

kegaiban. Hanya Tuhan yang mempunyai kekuasaan melampaui manusia, bukan makhluk-makhluk gaib dan roh-roh menentukan nasib dan kehidupan manusia. Sesuai dengan pandangan tentang otonomi manusia, maka keberhasilan dan kegagalan manusia tidak sekedar sebagai nasib yang harus diterima melainkan ditentukan oleh usaha manusia.

c. Asumsi Epistemologi

Pancasila sebagai dasar filsafat hidup modern menerima dan menjunjung tinggi hasil-hasil ilmu pengetahuan ilmiah yang bersifat rasionalistik dan empiristik. Hal ini berbeda dengan filsafat Jawa yang lebih menekankan pengetahuan kerokhanian dengan menjalani *laku* untuk mengolah batin dan kehalusan rasa. Secara jelas disepakati bahwa Negara Indonesia modern “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” yang dapat diartikan bahwa Negara Indonesia harus diselenggarakan secara rasional dan menghindari hal-hal yang prelogisme dan yang irasional, seperti diungkapkan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. (Bahar, dkk., 1995 : 19).

E. Keluarga sebagai Sistem Sosial Jawa

Hildred Geertz (1982: 153) menyatakan bahwa di dalam masyarakat manapun keluarga adalah jembatan antara individu dengan kebudayaannya. Nilai-nilai kemasyarakatan umum tertentu memberikan pembenaran serta makna bagi lembaga keluarga. Nilai-nilai kemasyarakatan yang sama merupakan elemen penting bagi lembaga-lembaga non keluarga, seperti susunan kekuasaan serta control sosial. Terdapat dua nilai yang penting dalam kehidupan keluarga dan sosial Jawa yaitu tentang *tata karma* “penghormatan” dan “terpeliharanya penampilan sosial yang harmonis”. Sikap hormat itu merupakan pedoman bagi tindak-tanduk sosial dalam berbagai konteks yang berlain-lainan, terhadap pejabat pemerintah, disekolah, di dalam organisasi, dalam hubungan antara tetangga dan lain-lain. Berkaitan dengan nilai yang kedua yaitu terpeliharanya penampilan sosial yang harmonis dalam ungkapan Jawa disebut *rukun*, dengan memperkecil pernyataan konflik sosial dan pribadi secara terbuka dalam bentuk apapun.

Sistem nilai dalam kebudayaan Jawa tidak memberikan ruang yang cukup bagi ekspresi individual. Namun berkaitan dengan individualitas, orang Jawa itu individualistis. Orang Jawa mempunyai inti yang tidak pernah dibuka, kecuali kepada orang

dalam saja. Oleh karena itu dapat ditarik dua fenomena yang dipengaruhi sikap ini. Orang Jawa dapat mengekspresikan sikap setuju kepada segala hal, walaupun di dalam batinnya tidak setuju. Demikian pula orang Jawa sangat memelihara ruang diri, sehingga kritik terbuka dianggap membuka ruang itu dan tidak dapat menerimanya (Wiryamartana, 1993 : 120).

Orang Jawa memandang masyarakat sebagai “keluarga besar” dan berfungsi sebagaimana keluarga, sebagai tempat hidup yang menenteramkan dan membuat diri terlindungi. Orang Jawa berusaha memperlakukan orang lain yang perlu dihubungi seperti anggota keluarga. Tetangga selalu diperlakukan sebagai keluarga. Bahkan panggilan kekeluargaan seperti, *pak, bu, mbah, paktde, paklik, bulik, mbakyu, adik* dan seterusnya, dipakai sebagai panggilan bukan saja bagi tetangga dan masyarakat sekitar bahkan bagi orang asing. Walaupun tetangga, kenalan diperlakukan sebagai keluarga, namun hanya pada keluarga inti mau benar-benar bebas dan membuka diri (Suseno, 2003 : 49).

Kekeluargaan Jawa juga terlihat di dalam hirarkhi sosial atau kekuasaan. Seorang kepala dusun dianggap sebagai halnya bapak dari semua anggota masyarakat di lingkungannya. Ia dituakan atau dianggap *seseputuh* sebagai orang tua walaupun usianya masih muda. Orang Jawa terkadang nampak sebagai orang yang rasialis. Hal ini terjadi karena orang Jawa memegang mitos bahwa mereka berasal dari satu keturunan.

Kekeluargaan berkaitan dengan keluarga inti dan hubungan sosial memiliki perbedaan. Di dalam keluarga inti kekeluargaan itu memilah-milah sanak saudara ke dalam turunan dan perincian tua-muda (*tua-enom*) diukur dari posisi diri. Di dalam masyarakat mempunyai fungsi keakraban, yaitu bagaimana menempatkan diri di antara orang-orang. Terdapat orang yang dipandang lebih muda dan ini berlaku bagi status yang lebih rendah (misalnya guru dengan murid, maka murid dipandang lebih muda). Terdapat orang-orang dalam derajat yang sama seperti teman sebaya, sama kaya sama pangkat dan profesinya menggunakan tegur sapa dengan derajat penghormatan atau keakraban yang sama pula. Kondisi semacam itu di dalam keluarga inti tentu saja tidak terdapat karena dari diri anggota keluarga mesti lebih tua atau lebih muda. Sehingga dalam keluarga inti tidak ada seorangpun yang sama kedudukannya dengan diri (Geertz, 1982 : 24).

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. *Rukun* adalah keadaan ideal

yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Suasana seluruh masyarakat semenjak dari keluarga, tetangga, desa, dan setiap komunitas seharusnya diliputi kerukunan. Kerukunan dapat tercapai jika setiap orang tidak mementingkan kepentingan pribadi, karena di situ dapat menimbulkan konflik. Seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk menciptakan kerukunan salah satunya adalah selalu mengekspresikan persetujuannya terhadap semua hal dan tidak melakukan kritik secara terbuka. Bagi masyarakat Jawa yang bijaksana, karena kehalusan budinya mampu menangkap isyarat-isyarat dari perilaku orang lain, sehingga ketidaksetujuan tidak perlu dinyatakan terang-terangan dan dengan kritik yang terbuka.

Bagi orang Jawa selain jabatan sosial yang membedakan seorang *priyayi* dan orang kebanyakan adalah moralnya. Moralitas *priyayi* ditandai dengan sifat kehalusan dan moralitas kebanyakan lebih menunjukkan kekasaran, seperti halnya mereka membedakan antara kerja halus dan kasar yang menandai cara hidup mereka. Seorang yang bekerja dengan kekuatan fisik dianggap kasar sedangkan yang bekerja dengan kemampuan pikiran dan kemampuan kejiwaan lain dipandang sebagai kerja halus. (Anderson, 1984 :69).

Berbeda dengan profesi halus-kasar, di dalam moralitas Jawa, kehalusan budi dapat dicapai oleh siapapun melalui latihan yang disebut olah kebatinan. Kehalusan budi dipandang sebagai sifat kesatriya, dan sifat itu dapat dicapai oleh siapapun walaupun bukan dari kalangan priyayi. Priyayi bahkan rajapun dapat bersifat kasar, dalam mitologi wayang dilukiskan sebagai raja raksasa atau *buto*, atau raja berwatak *buto*. Sifat kesatriya yang penuh kehalusan jiwa,

Harmoni sosial atau kerukunan dapat dicapai jika memelihara ambisi-ambisinya agar tidak menimbulkan konflik. Ambisi yang membesar-besarkan tujuan di dunia ini dapat memutuskan kekeluargaan yang aman tenteram dan lingkungan persahabatan religius maupun masyarakatnya. “Di dunia luar yang memusuhinya ia akan sendirian, berada di luar hukum, tidak terlindung secara emosional dan tidak aman” (Mulder, 1973 : 26). Prinsip kerukunan tidak berarti orang Jawa tidak mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi melainkan merupakan suatu mekanisme sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu demi kesejahteraan kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip kerukunan memberikan kemungkinan kepada orang Jawa

untuk memperlihatkan sikap sosial tanpa sekaligus meninggalkan kepentingan pribadi.

F. Kekeluargaan Sebagai Sistem Sosial Indonesia

Banyaknya orang Jawa yang duduk dalam birokrasi bukan hanya karena rezim kolonial lebih membutuhkan birokrasi di Jawa, melainkan berkaitan dengan pandangan hidup orang Jawa juga. Orang Jawa memandang kerja seorang birokrat sebagai kerja halus karena tidak bekerja menggunakan kekuatan fisik atau otot semata yang dipandang sebagai kerja kasar. Menjadi birokrat adalah kesempatan seorang dari kalangan kebanyakan yang bukan *priyayi* menjadi *priyayi*. Rezim kolonial pertama-tama memberikan kesempatan pendidikan kepada kalangan keluarga bangsawan atau para birokrat tradisional (*priyayi*). Tidak jarang untuk mendapatkan kesempatan untuk bersekolah sebagai pembuka jalan menjadi birokrat, seorang anak dari keluarga kebanyakan ikut sebagai abdi para *priyayi* dengan sebutan *ngenger*. Dengan *ngenger* ia masuk dalam lingkungan bangsawan atau *priyayi* dan mendapat status bagaikan anak angkat sehingga berkesempatan untuk belajar di pendidikan formal. Dengan bekal pendidikan formal itu ia mendapat kesempatan bekerja dalam instansi pemerintahan.

Oleh Soepomo negara kekeluargaan adalah suatu ide negara yang paling sesuai untuk Indonesia dikarenakan sesuai dengan struktur sosial dan kebudayaan Indonesia asli. Negara kekeluargaan itu disimpulkan oleh Bouchier (2007: 3) ditandai dengan keserasian (*harmony*), saling membantu (*mutuality*) dan saling memberi (*reciprocity*) antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat.

Sukarno memahami bahwa istilah kekeluargaan itu sama dengan "*bebrayan*" dalam istilah Jawa. Ia memandang hidup "*bebrayan*" itu adalah hidup yang demokratis dalam arti demokrasi tidak sebagai suatu alat teknis melainkan sebagai suatu keyakinan. Ia memandang situasi kekeluargaan atau *gotong royong* merupakan ciri perjuangan masyarakat Indonesia dalam usaha membentuk negara atau dalam pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia itu merupakan perjuangan masyarakat dari segenap lapisan yang saling mendukung, bekerja sama. Pergerakan nasional bukan perjuangan satu golongan saja, tidak seperti India yang menurutnya merupakan perjuangan kelompok elit India terutama para industriawan yang disebutnya kaum borjuis (Soekarno, 1964 : 57, 58, 146). Dengan demikian Negara

kekeluargaan bagi Soekarno tidak sekedar sesuai dengan kebudayaan Indonesia tetapi sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan yang mencerminkan suasana demokratis. Ini berbeda dengan pandangan Baurchier bahwa Negara kekeluargaan, integralistik atau negara organis itu tidak demokratis.(Bourchier, 2007 : 4).

Perlu dikemukakan di sini bahwa kekeluargaan dalam sistem sosial Jawa adalah sistem yang dipraktekkan dalam masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kekeluargaan dalam kenegaraan Indonesia sebagai konsep normatif yang masih perlu usaha untuk mewujudkannya. Jika kekeluargaan Jawa diwarnai oleh sikap primordialisme maka kekeluargaan Indonesia diharapkan bersifat nasional bahkan internasional. Kekeluargaan Indonesia bersifat nasional artinya memandang masyarakat sebangsa sebagai keluarga besar, bahkan dalam konsep kekeluargaan Indonesia maka dunia internasional perlu diciptakannya kekeluargaan antar bangsa.

Kekeluargaan tradisional Jawa menjunjung prinsip hormat dengan cara menempatkan diri secara tepat dalam hirarkhi sosial. Kekeluargaan Indonesia sesuai dengan sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” maka prinsip hormat lebih ditujukan kepada manusia sebagai subjek atau sebagai pribadi yang seharusnya dihormati. Penghormatan kepada pemimpin tidak lagi merupakan bentuk harmonisasi antara dunia gaib dan dunia nyata, yaitu pemimpin sebagai sosok yang dihubungkan dengan kekuatan gaib dalam kebudayaan tradisional. Hal ini dikarenakan kosmologi Indonesia tidak lagi sebagai kosmologi besar sebagaimana keyakinan tradisional yang menganggap dunia gaib sebagai bagian dari kosmos besar.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan beserta pembahasannya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang Jawa adalah penduduk asli Jawa yang sebagian terbesar tinggal di daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Mayoritas beragama Islam, namun secara kerokhanian dapat dibagi menjadi dua yaitu yang berorientasi pada pandangan hidup *kejawen* sebagian lagi berorientasi pandangan “hidup mistik Islam” yaitu campuran antara Islam dengan *kejawen*, dan sebagian berorientasi pandangan hidup Islam reformis yang berusaha mengenalkan Islam secara murni.

2. Masyarakat Jawa menerapkan sistem sosial “kekeluargaan” dengan berdasar pada dua prinsip “hormat” dan prinsip “penampilan sosial yang harmonis” atau “kerukunan”. Bagi mereka yang berorientasi pandangan hidup *kejawen* dan “mistik Islam” sebagian besar mempertahankan faham kosmologi besar yang memasukkan alam gaib sebagai lingkungan yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup konkret. Pandangan semacam ini mewarnai hampir sebagian besar penduduk tradisional.
3. Sistem sosial kenegaraan Indonesia berdasarkan kepada keserasian (*harmony*), *saling membantu* (*mutuality*) dan saling memberi (*reciprocity*) bukan hanya antar warga negara tetapi antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Oleh karena “sistem kekeluargaan” ini berlaku bagi masyarakat modern, maka tidak lagi berdasar pada kosmologi besar seperti dalam masyarakat tradisional Indonesia. Keyakinan kosmologi yang mendasari sistem sosial Indonesia mengikuti kosmologi modern yang tidak memasukkan dunia gaib alam lingkungan kesatuan kosmos.
4. Sistem sosial Jawa, sistem sosial Indonesia tradisional yang berdasar dua prinsip “hormat” dan “kerukunan” memiliki kesamaan dengan system sosial Indonesia. Perbedaannya terletak pada makna kerukunan yang tidak lagi mengarah kepada “penampilan sosial yang hamonis” dengan cara menyembunyikan ketidak setujuan dengan keterusterangan. Alasannya, adalah masyarakat Indonesia modern telah dapat menerima perbedaan dan menerima kritik yang terus terang karena secara epistemologis memberikan tempat rasio di atas perasaan; berbeda dengan epistemologi Jawa yang menempatkan rasa di atas rasio.

H. Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict R.O’G, 1984, “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa”, dalam Miriam Budiardjo (ed), **Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa**, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati (ed), 1995, **Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)**,

- Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei – 22 Agustus 1945**, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Bourchier, David, 2007, **Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)**, Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta, alih bahasa Agus Wahyudi.
- Geertz, Hildred, 1982, **Keluarga Jawa**, Grafiti Press, Jakarta, penerjemah Zoebaedi.
- Mulder, Niels, 1973, **Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nasikun 1989, **Sistem Sosial Indonesia**, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Peursen, C.A., Van, 1980, **Orientasi di Alam Filsafat**, PT. Gramedia, Jakarta, diterjemahkan oleh Dick Hartoko.
- Sukarno, 1964, **Tjampak Pancasila : Pancasila Dasar Falsafah Negara**, Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 2003 **Etika Jawa : Sebuah Analisa Filsafati tentang Kebijakan Hidup Jawa**, PT. Gramedia, Jakarta.
- Wiryamartana, Kuntara, 1993, “Usaha Refleksi Filosofis dalam Alam Pemikiran Jawa”, dalam Tim Redaksi Driyakara, **Jelajah Hakikat Pemikiran Timur**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.